

UNDIAN SUTERA BANK BPD DIY

Sartono Menangkan Mobil Toyota Raize

WONOSARI (KR) - Sartono tidak menyangka sama sekali jika akan mendapatkan hadiah pertama Toyota Raize dari Undian Regional Tabungan Sutera dan Sutera Emas tahun ke 30. Sartono mengaku telah menjadi nasabah setia Bank BPD DIY selama lebih dari 17 tahun. "Terimakasih hadiah undian dari PT Bank BPD DIY kepada nasabah. Kami sebagai nasabah berharap PT Bank BPD DIY terus maju, jaya dan berkembang selalu bersama masyarakat" kata Sartono, Jumat (23/12). Penyerahan mobil Toyota Raize dilakukan Pemimpin Cabang PT Bank BPD DIY Cabang Wonosari Andrianto Agus Susilo di halaman SMA Negeri 1 Patuk disaksikan Kepala Sekolah dan guru-guru di



KR-Istimewa

Penyerahan hadiah mobil.

SMAN 1 Patuk Gunungkidul .

Undian Regional Tabungan Sutera dan Sutera Emas tahun ke 30 dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 di Grand Inna Malioboro.

"Dengan meningkatkan saldo tabungan, maka kesempatan untuk mendapatkan hadiah undian

menjadi lebih banyak. Bank BPD DIY senantiasa memberikan pelayanan yang istimewa kepada nasabah salah satunya fitur mobile banking yang semakin lengkap, sehingga nasabah dapat menikmati kemudahan dan kecepatan transaksi" ujar Andrianto Agus Susilo.

(Ded)

RSUD WONOSARI SIAGA NATARU

IGD Buka 24 Jam

WONOSARI (KR) - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari dr Heru Sulisyowati mengungkapkan, untuk mendukung pelayanan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) jajaran pelayanan siaga. Artinya petugas kesehatan siap melakukan layanan di rumah sakit, mengantisipasi lonjakan kunjungan dari pasien traveling maupun perantau yang kembali di Gunungkidul.

"Layanan di RSUD tetap buka, termasuk layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) selama 24 jam. Petugas tentu meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi pasien traveling maupun pemudik," kata Direktur RSUD Wonosari dr Heru Sulistyowati, Selasa (27/12).

Diungkapkan, poliklinik tetap buka seperti biasa. Karena memang untuk libur Hari Natal tepat pada hari Minggu.

Termasuk libur pada 1 Januari 2023. Sehingga untuk pelayanan di masing-masing klinik masyarakat atau pasien tetap dapat mengakses seperti biasa. Koordinasi terus dilakukan, agar nantinya seluruh layanan di rumah sakit dapat diberikan secara maksimal kepada pasien. " Prinsipnya layanan kesehatan di RSUD berjalan seperti biasa dan tetap siaga," ujarnya.

Berkait dengan cuaca ekstrem, dr Heru mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan. Cuaca yang sebelumnya terjadi panas beberapa hari kemudian sekarang ini hujan, perlu antisipasi. Melakukan olahraga dan jika perlu minum vitamin. Termasuk akan bepergian bisa melihat situasi cuaca pada saat ini. Sehingga dapat mendukung untuk menjaga kesehatan tubuh.

(Ded)

OPD DIMINTA KEJAR TARGET

Rendah, Serapan Anggaran Sampai Akhir Tahun

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta menyatakan bahwa tahun anggaran 2022 sudah memasuki akhir tahun tetapi serapan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih rendah. Karena itu secara khusus mengundang jajarannya dalam pertemuan di Sekretariat Daerah (Setda) pada Selasa (25/10). "Hingga pertengahan Oktober 2022, realisasinya baru 64,95 persen dan terdapat deviasi negatif antara 13 sampai 20 persen," katanya, kemarin,

Secara rinci dikatakan untuk realisasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik baru 42,11 persen. Sedangkan realisasi Dana Keistimewaan (Dana-is) sudah dalam kisaran 72,52 persen. Terdapat sejumlah OPD yang serapan

anggarannya rendah karena itu oihaknya meminta agar seluruh OPD memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun ini. Karena saat ini masih ada waktu hingga Desember 2022, "Kami minta agar semua OPD bisa menyesaikan," ujarnya.

Bupati menginstruksikan sejumlah langkah percepatan program kegiatan yang berujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Di antaranya yakni, melakukan koordinasi pengendalian internal unyuk mengkaji hambatan dalam pelaksanaan program. Kemudian memonitor dan mengevaluasi progres pelaksanaan program sesuai prosedur. "Kami berharap semua program berjalan sesuai rencana," terangnya.

(Bmp)

Rumah Kudhori Nyaris Diterjang Tanah Longsor



KR-Asrul Sani

Warga Kopat gotong-royong membersihkan material longsor dekat rumahnya Kudhori.

PENGASIH (KR) - Rumah milik Kudhori di Pedukuhan Kopat RT 7 RW 3 Kalurahan Karangasari, Kapanewon Pengasih nyaris diterjang tanah longsor. Bencana tersebut terjadi saat hujan lebat mengguyur wilayah Kabupaten Kulonprogo sejak Minggu (25/12).

"Hujan deras selama dua hari dua malam sejak Minggu kemarin telah menyebabkan tebing di sebelah rumah saya longsor. Alhamdulillah tembok masih utuh dan tidak ada korban jiwa," kata Kudhori di sela membersihkan material longsor-an, Selasa (27/12).

Saat peristiwa terjadi, Kudhori sedang bertandang ke rumah temannya di Wates. Informasi ten-

tang adanya longsor dan material longsor-an nyaris menghantam tembok rumahnya justru diketahui dari grup media sosial kampungnya.

"Kebetulan saya keluar. Kemudian ada informasi dari grup kampung terjadi tanah longsor. Lalu kami berkoordinasi dengan pak RT karena (material longsor-an) juga hampir menutup akses jalan keluar masuk kampung," ucapnya.

Pascakejadian, Kudhori dengan dibantu tetangganya membersihkan material longsor-an.

Ketua RT 7 RW 3 Pedukuhan Kopat, Wasidi mengungkapkan saat hujan lebat mengguyur ada tiga kejadian tanah longsor di wilayahnya. Yakni di dekat rumahnya Kudhori,

Wasinem dan Amin.

"Saat musim penghujan, wilayah kami memang sering terjadi tanah longsor, karena kontur tanahnya gembur. Apalagi kalau hujan, air di atas tebing menggenang dan masuk celah bebatuan. Sehingga membuat tanah di bawah batuan menjadi gembur kemudian longsor," tuturnya.

Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo, Joko Sato Agus Nahrowi mengungkapkan pihaknya menerima delapan laporan kejadian akibat hujan deras beberapa hari terakhir ini.

Peristiwa pohon tumbang di Tayuban, Kapanewon Panjatan dan Hargorejo Kapanewon Kokap. Tanah longsor di wilayah Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap sebanyak dua titik, Kalurahan Karangasari Kapanewon Pengasih satu titik dan Kalurahan Kalirejo, Kokap sebanyak dua titik. Sedangkan Kalurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo, air Papah meluap.

(Rul)

DI KAWASAN LAGUNA GLAGAH

Puluhan Lapak Terendam Banjir

TEMON (KR) - Luapan air dari Laguna Glagah akibat meningkatnya intensitas hujan menyebabkan puluhan warung makan dan souvenir di kawasan wisata Pantai Glagah, Kapanewon Temon, Kulonprogo terendam banjir.

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah V Kulonprogo, Aris Widyatmoko menegaskan banjir yang merendam kawasan tersebut bukan banjir rob, tapi dari luapan laguna yang dekat area warung.

"Dari Senin (26/12) hujan terus yang mengakibatkan air laguna meluap sampai menggenangi warung. Sampai sekarang masih ada genangan setinggi 25 centimeter," kata Aris Widyatmoko, Selasa (27/12).

Setelah genangan air surut nampak para peda-

gang melakukan pembersihan lokasi tersebut. Dalam upaya mengurangi genangan air para pedagang dan petugas juga melakukan penyedotan air menggunakan mesin diesel.

Sementara itu Koordinator Lapangan Wisata Laguna Glagah, Ayu Dwi menjelaskan, banjir berdampak pada sekitar 50 lapak pedagang, sehingga banyak pedagang memutuskan libur sementara waktu.

Tercatat 200 lapak di sepanjang pintu masuk hingga pemecah ombak



KR-Asrul Sani

Air luapan dari Laguna Glagah menggenangi lapak-lapak pedagang.

dan dari jumlah tersebut 50-an lapak tergenang banjir. Peristiwa banjir di lokasi tersebut sebenarnya bukan kali pertama bahkan tergolong sering terjadi. Salah satu penyebabnya tidak ada saluran drainase untuk membuang air saat terjadi luapan.

"Kalau hujan deras dan lama, air Laguna pasti mbludak kemudian membanjiri lapak-lapak pedagang," tutur Ayu berharap pemerintah turun tangan mengatasi masalah tersebut salah satunya membuang saluran pembuangan air limbah Laguna saat hujan lebat.

(Rul)

Pembahasan Raperda DPRD Penuhi Target

WONOSARI (KR) - DPRD Kabupaten Gunungkidul berhasil menyelesaikan 12 target pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2022. Ke 12 raperda tersebut terdiri dari sembilan usulan bupati dan tiga rancangan lainnya merupakan inisiatif dari anggota DPRD Gunungkidul. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto mengatakan, tidak ada masalah dengan propemperda tahun ini. Proses pembahasan sudah sesuai dengan target, karena ke 12 raperda yang dicanangkan telah selesai dibahas seluruhnya. " Saat ini tinggal menjadwalkan paripurna untuk menetapkan tiga raperda yang secara ke-

tugasan untuk propemperda sudah selesai," katanya, kemarin.

Sementara untuk kesempatan terakhir telah diselesaikan tiga raperda inisiatif DPRD dan untuk sembilan rancangan usulan bupati juga sudah dibahas semua. Bahkan untuk tiga raperda inisiatif sudah mendapatkan fasilitas dari Pemerintah DIY dan prosesnya tinggal penye-larasan serta penetapan menjadi perda baru.

Penyelesaian target tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik hingga membuat target raperda bisa diselesaikan seluruhnya. Pihaknya berharap mudah-mudahan ke depan kinerja yang terbangun dengan baik ini bisa terus ditingkatkan.

"Kami bersyukur seluruh target raperda tahun ini berhasil diselesaikan," ujarnya,

Terpisah Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih SE menyatakan, tugas pokok dan fungsi DPRD ada tiga. Selain pembentukan peraturan daerah, DPRD juga memiliki fungsi terkait anggaran dan melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD. Ketugasan yang dimiliki seluruhnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan adanya pembahasan perda, pembahasan APBD serta memberikan hasil pengawasan ke pemkab secara berkala setiap tiga bulan sekali berjalan dengan baik.

(Bmp)

PERUBAHAN PARADIGMA & PEMENUHAN HAK DISABILITAS

FORMALITAS ATAU KEHARUSAN?

Penyandang Disabilitas seringkali dipandang sebagai kelompok masyarakat dengan berbagai keterbatasan. Mereka dianggap tidak mampu mandiri karena memerlukan bantuan untuk dapat menjalani aktivitas hariannya. Faktanya, penyandang disabilitas juga memiliki banyak potensi dan kelebihan yang bukan hanya mendukung kemandirian tetapi juga menorehkan berbagai prestasi yang menginspirasi.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, penduduk disabilitas diperkirakan sejumlah 6,2 juta jiwa dengan kategori sedang dan berat. Sebagian besar penyandang disabilitas tersebut termasuk dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sekitar 2,8 juta jiwa.

Menurut data Susenas tersebut, kondisi sosial ekonomi penyandang disabilitas masih sangat timpang dibandingkan bukan penyandang disabilitas. Dalam hal pendidikan misalnya, sekitar 48% penyandang disabilitas mengalami putus sekolah dan tidak memiliki ijazah pendidikan formal. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas jauh lebih banyak bekerja di sektor informal, atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Sehingga tidak heran, kemiskinan bukanlah hal yang tidak lazim bagi mereka. Tingkat kemiskinan penyandang disabilitas diperkirakan masih sekitar 15% pada tahun 2021.

Kondisi tersebut hanya sebagian tantangan yang mereka hadapi. Tantangan dalam penanganan isu-isu yang berkaitan dengan disabilitas banyak berkaitan dengan stigma dan persepsi masyarakat terhadap mereka. Seringkali penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dan menghadapi stigma sosial yang menghambat kemandirian dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas. Penyandang disabilitas juga dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak mampu berdaya dan hanya membutuhkan bantuan sosial.

Sejauh ini, keterbatasan tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi produktif dan berkontribusi aktif di lingkungannya. Terlebih pada masa Pandemi Covid-19, penyandang disabilitas termasuk kelompok masyarakat rentan yang sangat terdampak, baik dari aspek sosial, kesehatan,



maupun ekonomi. Hasil studi (2021) menunjukkan bahwa selama pandemi, penyandang disabilitas sangat rentan terhadap gangguan psikososial dan banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan. Mereka sulit untuk mendapat pekerjaan kembali yang berakibat menurunnya pendapatan, bahkan sebagian tidak dapat memenuhi konsumsi sehari-hari yang memadai. Selain itu, dampak pandemi juga mengharuskan penyandang disabilitas mengurangi kunjungan terapi dan rehabilitasi baik karena faktor ekonomi maupun kesehatan.

PERUBAHAN PARADIGMA TERHADAP DISABILITAS

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat harus mengubah pemikiran bahwa penanganan disabilitas hanya merupakan isu sosial dan mereka hanya diberikan bantuan (charity based). Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas harus berdasarkan pemenuhan hak (human right based). Dalam hal ini, kebijakan dan program pemberdayaan disabilitas bukan hanya tanggung jawab Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial di tingkat daerah, namun menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh kementerian/lembaga dan perangkat daerah. Dengan demikian, pemberdayaan penyandang disabilitas mencakup seluruh sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, serta layanan dan fasilitas publik.

Indonesia telah meratifikasi convention on the rights of persons with disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), mengesahkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, beserta dengan berbagai peraturan turunan sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan

lainnya dalam mewujudkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

DATA TERPILAH SEBAGAI PRASYARAT PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Meskipun dukungan regulasi dan kebijakan terkait penyandang disabilitas sudah cukup baik dan didukung dengan keberadaan Organisasi Penyandang Disabilitas yang sangat aktif, sebagian penyandang disabilitas masih memiliki keterbatasan dalam mengakses program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan kualitas data terpilah disabilitas yang dapat mengidentifikasi dimana mereka, kondisi mereka, dan kebutuhannya apa. Hal ini sangat mempengaruhi ketepatan penyusunan dan penentuan sasaran program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan pada 15 Oktober – 14 November 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas dan ketersediaan data terpilah penyandang disabilitas di Indonesia. Melalui Regsosek, pemerintah akan memiliki basis data yang tidak hanya menyediakan informasi mengenai kondisi dan tingkat kedisabilitasan seseorang tetapi juga menyediakan data dan informasi mengenai profil kependudukan, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan juga tingkat kesejahteraannya.

Dengan adanya data terpilah lengkap dengan profil dan tingkat kesejahteraannya, pemerintah akan mampu mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga program dan layanan yang diberikan dapat dirancang secara tepat sasaran dan

tepat manfaat.

Lebih lanjut, ketersediaan data by name by address dan dilengkapi dengan kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk akan meningkatkan kepastian penyandang disabilitas untuk mengakses program dan layanan pemerintah. Program dan layanan pemerintah yang dimaksud bukan hanya terbatas pada program perlindungan sosial, tetapi juga program-program yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan, dan lain sebagainya.

Selain itu, berkaca pada pembelajaran pandemi COVID-19 dan berbagai kejadian bencana di Indonesia, data sosial ekonomi seluruh penduduk dengan pengelompokan kesejahteraan juga menjadi hal yang sangat diperlukan untuk memastikan pemerintah dapat memberikan respon yang tepat bagi penyandang disabilitas yang terdampak kejadian tidak terduga.

Perubahan paradigma dan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang setara menjadi sebuah keharusan dan harus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak –pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan tidak akan berdampak secara optimal bagi penyandang disabilitas tanpa didasarkan pada data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Regsosek hadir untuk memastikan pelaksanaan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui berbagai program dan kebijakan yang komprehensif dan tepat.